

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 1999. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*.
 Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika.

_____, 1999. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Perimbangan
 Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Departemen
 Komunikasi dan Informatika.

_____, 2000. *Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan
 dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*

_____, 2000. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan
 Retribusi Daerah*

_____, 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*

_____, 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah..*

_____, 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
 Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

_____, 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

_____, 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.*

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Farian, Endi. 2010. Skripsi. *Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten X*. diakses tanggal 27 Mei 2016).

Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Jakarta: LIPI Press.

Halim, Abdul. 2010. *Problem Desentralisasi dan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.

Juddy Julian Pilat. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah (Apbd) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan pemerintah kota manado tahun anggaran 2011 – 2016. Jurnal Accountability. Vol 06 No 01, 2017.

Jumingan. Analisis Laporan Keuangan. Surakarta: Bumi Aksara, 2006.

Kaho, Josef Riwu. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Koesoemahatmadja, R.D.H. 1979. Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Bina Cipta, Bandung.

Mahmudi. 2010. *Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik: Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Panduan bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. : Andi, Yogyakarta.

Nordiawan, Deddy. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.

Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sarundajang, S.H., 2005, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Solihin Dadang, Bratakusuma Supriady Dedy, 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wulandari, Anita. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Adminislrasi Publik* Vol 5 No 2 November. (Online) (<http://www.scribd.com/doc/101754251/JAUJ-Vol-09-No-2-Desember-2011> diakses tanggal 17 Agustus 2012).

Yuliati. 2001. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapi Otonomi Daerah, *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPPYKPN.

Nataluddin. 2001. *Potensi dana perimbangan pada pemerintahan daerali di Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.

Syaukani, H., HR., dkk., 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Cetakan II, Yogyakarta

